

ABSTRAK

Nasionalisme Mohammad Hatta Antara 1945-1956

Oleh Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro

Penulisan skripsi yang berjudul Nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956 ingin menjawab tiga permasalahan, pertama peran Mohammad Hatta periode 1945-1956, kedua hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956, ketiga pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik, ekonomi dan sosiologi, dengan metode penulisan deskriptif analitis.

Mohammad Hatta berperan dalam membentuk pemerintahan demokratis dengan memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui perubahan kedudukan KNIP, dan membuka kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui partai politik dalam pemilihan umum. Pemerintahan yang demokratis harus menerapkan landasan perekonomian yang mengedepankan kebebasan untuk mengembangkan perekonomian rakyat melalui koperasi dan penghematan keuangan negara. Dasar-dasar tersebut perlu didukung dengan penciptaan landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, demi terciptanya perdamaian dunia dan kesejahteraan rakyat.

Dengan penerapan demokrasi di Indonesia setiap gerakan oposisi harus berdasarkan pada konstitusi, Kestabilan dalam negeri dapat mendukung perjuangan diplomasi dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan di Indonesia. Langkah tersebut terbukti pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam persetujuan KMB di Den Haag.

Mohammad Hatta pada awal kemerdekaan menjalin hubungan dengan Sukarno dan Sutan Syahrir, namun dalam perkembangannya mengalami perbedaan prinsip, tetapi mereka mampu menghargai perbedaan di alam demokrasi. Karena dasar-dasar politik dalam dan luar negeri yang telah dibangun tidak diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dalam pegawai pemerintahan dan ketentaraan, maka pelaksanaan pendidikan politik dan pencapaian keadilan sosial dalam ekonomi tidak terlaksana.

Mohammad Hatta mengudurkan diri dari pemerintahan karena ia memandang bahwa perjuangan menegakkan demokrasi haruslah berlandaskan pada konstitusi. Dengan dasar inilah berbagai langkah strategis yang diambil Mohammad Hatta merupakan perwujudan nasionalismenya sebagai pelopor terciptanya demokrasi berdasarkan konstitusi.

ABSTRACT

Mohammad Hatta Nationalism During 1945-1956

By Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro

The aim of the thesis entitled Mohammad Hatta nationalism in 1945-1956, was to answer three problems. First, Mohammad Hatta contributions during 1945-1956, second the relationship between Mohammad Hatta and Sukarno as well as Sutan Syahrir in 1945-1956, and third was the influence of Mohammad Hatta nationalism during 1945-1956.

The research used historical method which covered heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. The approach used in this research is political, economical, and sociological with analytical descriptive writing.

Mohammad Hatta had contribution in building the democratic government by giving supervision on the running of government through the positioning reform of KNIP, and giving civilians the opportunity to participate through political parties in general election. The democratic government must apply economic-based that proposing freedom, for developing public's economics through cooperation and national economizing finance. The basics mentioned above needed to be supported by creating the foundation of Indonesian active and independence foreign politics for the citizen's welfare and world peace.

By applying democracy in Indonesia, every opposition's movement must be based on constitution. Therefore, nationality stability will be achieved to support diplomatic struggle and to increase international's trust towards Indonesian government. The step was proved when Holland confessed the Indonesia's independence in KMB conference in Den Haag.

At the first time of Indonesian independence, Mohammad Hatta had good relationship with Sukarno and Sutan Syahrir but later they had different principals. However, they still appreciate the differences in democracy realm. Because the national and foreign political-base that had been built was imbalance with professionalism improvement of state officials and military, the application of political education and achievement of and social fairness faced its failure.

Mohammad Hatta resigned from the governmental with a consideration that the struggle for holding up the democracy should propose constitution. Hence, Mohammad Hatta took some strategic steps that reflect his nationalism as the upholder of constitutionally based democracy.